



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF SUGIYANTO
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 710723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.505.714.285**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
2. Tanah Seluas 549 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 1758 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.255.714.285

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.535.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, PIAGIO VESPA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. PESAWAT TERBANG, TECNAM P92 ECHO SUPER Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RAISE RAISE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CHR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000



6. MOBIL, HONDA CIVIC RS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 541.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.235.043.839

F. HARTA LAINNYA Rp. 7.250.000.000

Sub Total Rp. 17.066.758.124

III. HUTANG Rp. 454.695.802

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.612.062.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.